

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Godfrey, *et al.* (2010) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan antara agen (manajemen suatu usaha) dan *principal* (pemilik usaha). Menurut Sunarto (2009) teori keagenan menyatakan bahwa antara manajemen dan pemilik mempunyai kepentingan yang berbeda. Teori keagenan juga menyatakan bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan (Jensen and Mackling, 1976) dalam (Sunarto, 2009). Di dalam hubungan keagenan, terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama pemilik dan memberi wewenang untuk membuat keputusan yang terbaik bagi pemilik, dan dapat memuaskan serta menjamin manajemen (*agent*) untuk menerima penghargaan (Lambert, 2001). Manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak didasarkan pada kinerja perusahaan (Sunarto, 2009).

Kinerja perusahaan yang telah dicapai oleh pihak manajemen diinformasikan kepada pihak pemilik dalam bentuk laporan keuangan (Sunarto, 2009). Scott (2003:18) menyatakan di dalam perusahaan, seringkali diasumsikan bahwa agen mengetahui lebih banyak informasi tentang perusahaan dibandingkan dengan pemilik perusahaan sehingga dapat memicu terjadinya simetri informasi.

Scott (2003:18) lebih lanjut menjelaskan terdapat dua tipe asimetri informasi, yaitu:

1. *Adverse selection*, yaitu tipe asimetri informasi dimana salah satu pihak yang melakukan transaksi bisnis memiliki lebih banyak informasi dibandingkan pihak-pihak lain.
2. *Moral hazard*, yaitu tipe asimetri informasi dimana salah satu pihak yang melakukan transaksi bisnis, dapat mengamati tindakan yang dilakukan dalam transaksi bisnis tersebut, sedangkan pihak-pihak lain tidak bisa. Tindakan manajer yang tidak sepenuhnya diketahui oleh pemegang saham termasuk dalam tipe ini.

Asumsi bahwa antara pihak pemegang saham dan manajer bertindak untuk memaksimalkan kepentingan masing-masing, mengakibatkan pihak manajemen dapat memanfaatkan asimetri informasi tersebut untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh pihak pemegang saham. Hal ini dapat mendorong pihak manajemen untuk cenderung melakukan perilaku yang tidak semestinya, seperti melakukan praktik manajemen laba.

Watts dan Zimmerman (1986) dalam Muljono (2008) berpendapat bahwa hubungan antara pihak pemegang saham dan manajemen sering kali ditentukan oleh angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Kinerja pihak manajemen diukur, dinilai, serta diawasi oleh pihak pemegang saham agar pihak pemegang saham dapat melihat sejauh mana pihak manajemen meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Laporan keuangan juga dijadikan dasar oleh beberapa perusahaan untuk memberikan kompensasi kepada pihak manajemen. Tak hanya

itu, laporan keuangan juga dijadikan bahan pertimbangan untuk pihak-pihak lain, seperti kreditor dan pemerintah. Kreditor dapat memberikan pinjaman dengan mempertimbangkan laporan keuangan tersebut. Begitu pula dengan pemerintah yang menetapkan regulasi dengan mempertimbangkan laporan keuangan perusahaan (Sulistiawan, 2008).

Muljono (2008) berpendapat bahwa ketergantungan pihak eksternal pada angka akuntansi, kecenderungan pihak manajemen untuk mementingkan keuntungan sendiri, dan adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan yang tinggi, mendorong pihak manajemen untuk memainkan angka akuntansi agar laporan keuangan menampilkan laba tertentu sesuai dengan kepentingan pihak manajemen, sehingga laporan keuangan yang awalnya ditujukan untuk memberikan informasi pada pihak pemegang saham dan eksternal justru dapat menyesatkan penggunaannya.

Agency cost atau biaya agensi digunakan untuk mengatasi timbulnya masalah-masalah tersebut. Menurut Jensen dan Meckling (1976), *agency cost* merupakan total penjumlahan dari *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh pihak prinsipal untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku pihak agen. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh pihak agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa pihak agen akan bertindak untuk kepentingan pihak prinsipal. *Residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal

sebagai akibat dari perbedaan keputusan pihak agen dan keputusan pihak prinsipal.

2.1.2 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif merupakan cabang riset akademis pada area akuntansi yang berfokus pada penjelasan dan prediksi praktik akuntansi. Teori akuntansi positif mencoba untuk memahami dan memprediksi pilihan kebijakan akuntansi yang akan ditetapkan oleh perusahaan (Watts dan Zimmerman, 1986, dalam Gumanti, 2000). Teori akuntansi positif memaparkan suatu teori akuntansi yang berusaha mengungkapkan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Watts dan Zimmerman (1986) mengemukakan tiga hipotesis yang mendasari pemilihan metode akuntansi untuk perusahaan, yaitu:

1. Hipotesis rencana bonus

Manajer perusahaan yang termotivasi oleh perolehan bonus akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba saat ini. Laba yang meningkat akan memengaruhi bonus yang diterima oleh manajer perusahaan.

2. Hipotesis *debt covenant*

Watts dan Zimmerman (1986) memprediksi bahwa semakin tinggi rasio hutang, maka semakin mungkin manajer memilih metode akuntansi untuk meningkatkan laba. Semakin tinggi rasio utang, perusahaan semakin mungkin untuk terkendala dalam perjanjian utang. Perjanjian utang mensyaratkan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh perusahaan, seperti menjaga posisi keuangan pada tingkat tertentu dan sebagainya. Apabila perusahaan

tidak dapat menjaga hal tersebut, akan timbul biaya-biaya teknis, seperti adanya penalti, untuk menyelesaikan pelanggaran perjanjian tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba saat ini.

3. Hipotesis biaya politik

Hipotesis biaya politik memprediksi bahwa perusahaan besar akan menggunakan metode akuntansi yang cenderung mengurangi laba yang dilaporkan. Perusahaan tidak ingin terlihat sebagai perusahaan dengan laba yang tinggi, karena biaya politik yang dikeluarkan akan semakin tinggi pula. Contohnya adalah ketika perusahaan memiliki laba tinggi, maka pengenaan pajak yang tinggi dan tuntutan pertanggungjawaban lingkungan juga tinggi.

2.1.3 Pengendalian Internal

2.1.3.1 Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah rencana, metode, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamatan terhadap aset, kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain (Kumaat, 2011). Menurut Moeller (2009), pengendalian internal adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manajemen, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang reliabilitas informasi keuangan dan operasional, kepatuhan terhadap peraturan, keamanan aset, efisiensi operasional, pencapaian tujuan, dan nilai integritas dan etika. Secara garis besar pengendalian internal merupakan proses yang telah disusun oleh manajemen untuk mengontrol

seluruh aktivitas perusahaan. Didesain untuk mencapai tujuan perusahaan yang efektif dan efisien yang artinya seluruh sumber daya perusahaan dikelola dan diawasi secara baik.

IIA *International Standards for the Practice of Internal Auditing* mendefinisikan pengendalian sebagai berikut, yaitu: “segala tindakan yang dilakukan manajemen, direksi, dan pihak lain untuk mengelola risiko dan meningkatkan peluang tercapainya tujuan perusahaan.”. Artinya segala tindakan yang dilakukan oleh manajemen termasuk pengelolaan rencana, pengelolaan risiko, dan pelaksanaan kinerja yang sesuai untuk memberikan kepercayaan atas tercapainya tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.3.2 Tujuan Pengendalian Internal

Alasan bagi suatu perusahaan untuk menerapkan sistem pengendalian internal adalah untuk membantu manajemen dengan tujuan tercapainya mekanisme kerja yang lebih efisien dan efektif (Kaunang, 2012). Artinya pengendalian internal dibutuhkan bagi perusahaan untuk membantu manajemen dalam mewujudkan kinerja yang lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh COSO, Arens (2008) memaparkan tiga tujuan umum bagi manajemen dalam merancang suatu pengendalian internal.

1) Keandalan laporan keuangan

Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesional untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan

dalam pelaporan misalnya GAAP. Tujuan pengendalian internal yang efektif terhadap laporan keuangan ialah untuk memenuhi tanggung jawab pelaporan ini.

2) Efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi

Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan. Sebuah tujuan penting atas pengendalian tersebut adalah akurasi informasi keuangan dan nonkeuangan mengenai kegiatan operasi perusahaan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan.

3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

Perusahaan publik, perusahaan non publik, maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk mematuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. Pengendalian internal merupakan suatu cara pengendalian diri yang dilakukan perusahaan untuk tetap mematuhi berbagai hukum dan peraturan tersebut.

Pada dasarnya, setiap pelaku bisnis yang baik dari masa ke masa pasti memiliki kesadaran akan pentingnya pengendalian internal agar dapat sejalan dengan tujuan bisnis itu dan siap menghadapi peluang dan tantangan di luar institusi maupun di waktu mendatang.

2.1.3.3 Fungsi Pengendalian Internal

Fungsi audit internal adalah salah satu persyaratan mendasar *checks and balances* untuk terlaksananya tata kelola yang baik (*good governance*) (Kaunang, 2012). Saat ini fungsi audit internal yang dijalankan secara sehat dan objektif, dengan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan pengendalian risiko

serta kewenangan untuk menindaklanjutinya, adalah hal mendasar bagi praktik terbaik pelaksanaan tanggung jawab top manajemen.

Berdasarkan *Plan Advisory* yang dikeluarkan oleh AICPA tahun 2007, pengendalian internal dapat melindungi suatu perencanaan dengan dua cara yaitu:

- 1) *By minimizing opportunities for unintentional errors or intentional fraud that may harm the plan. (Preventive Controls)*
- 2) *By discovering small errors before they become big problems. (Detective Controls)*

Pengendalian internal dapat bertindak sebagai upaya pencegahan, yaitu dengan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan yang dapat merusak suatu rencana (tujuan). Pengendalian internal juga dapat bertindak sebagai upaya penemuan, yaitu dengan menemukan kesalahan-kesalahan atau kecurangan yang diharapkan tidak semakin membesar dan semakin merugikan perusahaan. Turner dan Owroso (2009) menambahkan satu fungsi lagi bagi pengendalian internal, yaitu sebagai *Corrective Control* atau fungsi koreksi. Untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan pada *preventive* dan *detective control*, pengendalian internal dapat menyediakan tindakan korektif sebagai suatu solusi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut.

2.1.3.4 Penilaian Kualitas Internal Auditor

Al-Muhtadi, Randa, *et al* (2012) dalam penelitiannya menggunakan sebelas komponen dalam penilaian kualitas internal audit. Yaitu: : kualifikasi pendidikan; sertifikasi kerja, pelatihan, dan pengalaman; ukuran departemen pengendalian internal; ukuran kinerja internal audit untuk menyiapkan dan

menyajikan laporan keuangan; pengetahuan tentang operasional perusahaan; independensi internal audit; tidak ikut berpartisipasi dalam wewenang eksekutif; pedoman internal audit; ketersediaan sistem untuk mengontrol kinerja kualitas internal audit.

2.1.3.5 Keterbatasan Pengendalian Internal

Consideration of Internal Control in a Financial Statement Audit, di dalam Boynton (2006), menyatakan bahwa terdapat beberapa keterbatasan yang dimiliki pengendalian internal, yang menyebabkan sebaik apapun pengendalian internal dilakukan, hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai akan pencapaian tujuan pengendalian perusahaan.

- 1) *Mistakes in judgement*
- 2) *Breakdowns*
- 3) *Collusion*
- 4) *Managemenmt override*
- 5) *Cost versus benefits*

Manajemen dapat saja melakukan penilaian yang tidak tepat dalam suatu pengambilan keputusan bisnis ataupun kegiatan rutin perusahaan, dikarenakan adanya informasi yang tidak tepat, atau keterbatasan waktu. Selain itu, manajemen atau karyawan juga dapat salah paham dalam menafsirkan suatu tugas atau perintah karena ketidakhati-hatian sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan yang tidak seharusnya. Keterbatasan pengendalian internal juga dapat terjadi karena kemungkinan adanya kolusi, yaitu kerjasama diantara beberapa orang untuk melakukan kecurangan.

2.1.3.6 Komponen Pengendalian Internal

Kumaat (2011) menjelaskan ada dua pendekatan dalam dunia pengawasan bisnis. Pendekatan klasik dan *COSO Framework of Internal Control*. Pengendalian internal versi klasik menekankan pada kelengkapan instrumen (perangkat) pengawasan dalam organisasi, yang terdiri dari:

- 1) Rencana bisnis dan evaluasi kinerja
- 2) Struktur atau bagan organisasi dengan memperhatikan prinsip pemisahan tugas dan rentang kendali
- 3) Uraian jabatan dan tingkatan jabatan
- 4) Peraturan perusahaan dan perangkat prosedur kerja
- 5) Sistem akuntansi dan penyajian laporan keuangan
- 6) Rencana anggaran dan pengendalian anggaran
- 7) Sistem administrasi dan sistem informasi manajemen
- 8) Internal audit yang menekankan pada uji kepatuhan dan penangkalan kejahatan

Pengendalian internal klasik tidak terpisahkan dari perkembangan ilmu manajemen dan menekankan pada sistem pengendalian yang terdokumentasi dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan. Semakin berjalannya waktu, semakin disadari adanya berbagai faktor yang masih perlu di teliti lebih jauh, seperti faktor manusia yang saling berinteraksi dalam lingkungan bisnis yang membentuk tata nilai (budaya) perusahaan, adanya risiko intrinsik atau risiko potensial yang kurang terbaca pada data masa lalu atau data sekarang, dan kelemahan komunikasi internal. Oleh karena itu sejak tahun 1992

COSO memperkenalkan kerangka pengendalian (*control framework*) yang terdiri dari lima unsur sebagai berikut:

1) Lingkungan pengendalian

Meliputi sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian internal organisasi. Lingkungan pengendalian ini sangat penting karena menjadi dasar bagi efektivitas unsur-unsur pengendalian yang lain.

2) Penilaian risiko

Semua organisasi menghadapi risiko, yaitu dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis maupun nonbisnis. Risiko yang dapat diidentifikasi dapat dianalisis atau dievaluasi sehingga bisa diperkirakan intensitas dan tindakan apa untuk meminimalkannya.

3) Prosedur pengendalian

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk standarisasi proses kerja, sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi terjadinya ketidakberesan serta kesalahan.

4) Pemantauan

Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian internal dapat dimonitor secara efektif melalui penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen.

5) Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan unsur-unsur yang penting dari pengendalian internal perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan pemantauan diperlukan oleh manajemen, untuk pedoman operasi, dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan.

2.1.3.7 Hal-Hal yang Berkaitan dengan Pengendalian Internal

1) Manajemen

Manajemen bertanggung jawab untuk menegakkan dan menjaga pengendalian internal entitasnya (Arens, 2011). Bahkan manajemen pada semua perusahaan publik di Indonesia, diharuskan untuk mematuhi peraturan No. X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan ini berisi tentang kewajiban bagi perusahaan publik untuk membuat laporan tahunan yang di dalamnya memuat tentang pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan.

Manajemen perusahaan harus menyusun pengendalian internal, hingga mampu memberikan keyakinan yang memadai, bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, kegiatan operasionalnya telah berjalan secara efektif dan efisien, serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan telah tercapai (Arens, 2011). Aktivitas pengendalian ini dilakukan pada seluruh level dalam perusahaan (Moeller, 2009). Artinya, seluruh pihak yang ada di dalam perusahaan harus melakukan pengendalian pada masing-masing tanggungjawabnya untuk memastikan bahwa tugas yang dilakukannya telah efektif dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Selanjutnya, manajemen juga

perlu mengawasi pelaksanaan pengendalian internal tersebut. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah pengendalian yang dijalankan sesuai dengan rencana dan apakah orang yang menjalankan pengendalian memiliki otoritas dan kualifikasi yang diperlukan untuk lakukan pengendalian dengan efektif (Arens, 2011).

2) Unit Internal Audit

Moeller (2009) menyatakan bahwa audit internal adalah suatu fungsi (unit) formal yang ada pada perusahaan untuk memeriksa dan mengevaluasi seluruh aktivitas dalam perusahaan sebagai suatu jasa untuk membantu manajemen, komite audit, dan pihak lain dalam perusahaan. Ruang lingkup pekerjaan unit audit internal adalah seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan (Moeller, 2009). Auditor internal mempunyai peran yang signifikan dalam memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tanggungjawabnya. Manajemen melaksanakan pengendalian internal, kemudian auditor internal secara independen menilai pengendalian internal yang dilakukan manajemen (Reding, *et al*, 2009).

Sistem pengendalian internal telah menjadi dasar untuk proses bisnis yang efektif, dan aktivitas utama dari audit internal adalah mengevaluasi dan menilai pengendalian yang dilakukan tersebut (Moeller, 2009). Sehingga, unit audit internal dapat dikatakan sebagai “pengawas” dalam pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan manajemen perusahaan. Tugas dan tanggung jawab unit audit internal paling kurang meliputi menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan (Bapepam, 2008). Moeller (2009) menyatakan salah satu fungsi unit

audit internal, “... *providing advice and counsel on new system, initiatives, and sevicees under development from an internal control perspective*”. Salah satu fungsi lain dari audit internal adalah memberikan masukan dan konsultasi dari persepektif pengendalian internal atas suatu sistem baru yang sedang dikembangkan oleh manajemen perusahaan. Audit internal juga senantiasa memberikan masukan dan saran pada pihak manajemen dalam pelaksanaan pengendalian internal perusahaan.

Keberadaan unit audit internal ditegaskan oleh Bapepam dalam peraturan No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal. Peraturan ini mewajibkan perusahaan publik untuk membentuk suatu unit audit internal beserta piagam audit internal. Peraturan oleh Bapepam ini didukung oleh Moeller (2009), yang menyatakan bahwa saat suatu entitas tidak mempunyai unit audit internal, manajemen harus mengambil langkah untuk membuat unit tersebut. Peraturan Bapepam No. IX.I.7 menyatakan bahwa Unit Audit Internal adalah unit kerja dalam Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan fungsi Audit Internal. Penggunaan nama atau istilah untuk Unit Audit Internal tersebut dapat ditetapkan oleh masing-masing Emiten atau Perusahaan Publik.

Seseorang yang bertanggungjawab dalam unit audit internal adalah kepala unit audit internal atau *Chief Audit Executive (CAE)*, yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama atas persetujuan dewan komisaris (Bapepam, 2008). Keberadaan kepala unit audit internal yang jelas akan memberikan sinyal

kepada *stakeholder* bahwa perusahaan benar-benar mengadakan fungsi audit internal yang efektif. Salah satu syarat utama untuk menjadi kepala audit internal adalah benar-benar memahami kebutuhan perusahaan risiko pengendalian yang potensial dan menentukan kontribusi apa yang dapat diberikan oleh unit audit internal untuk mengendalikan risiko tersebut. Selain itu, agar dapat bekerja secara efektif, kepala audit internal juga harus didukung oleh komite audit dan manajemen perusahaan (Moeller, 2009).

3) Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Perusahaan publik di Indonesia diwajibkan untuk memiliki komite audit, seperti yang terdapat pada Peraturan No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Peraturan ini mewajibkan perusahaan publik untuk membentuk suatu Komite Audit. Jika audit internal dibentuk dan bertanggungjawab pada dewan direksi yang tidak lain adalah manajemen perusahaan, komite audit dibentuk dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris yang bertindak sebagai wakil dari pemegang saham perusahaan. Artinya, komite audit menjadi wakil dari pemegang saham untuk menilai kinerja perusahaan.

Salah satu tugas komite audit yang terdapat dalam peraturan Bapepam No. IX.I.5 adalah melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal, serta melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko

yang dilakukan oleh direksi. “*Internal audit reports to the audit committee, which approves its overall planning activities and reviews the results of internal audits*” (Moeller, 2009). Komite audit membahas pertanggungjawaban pengendalian internal bersama dewan direksi untuk memastikan bahwa pengendalian internal telah berjalan dengan baik (Thanh dan Cheung, 2010). Komite audit bertugas *mereview* hasil audit internal yang dilakukan oleh unit audit internal, dimana objek yang diaudit oleh unit audit internal tersebut adalah pengendalian internal yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, komite audit juga berhubungan dengan pengendalian internal yang dilakukan perusahaan.

4) Manajemen Risiko

Setiap perusahaan ada untuk memberikan nilai pada para pemangku kepentingannya (*stakeholders*), namun nilai tersebut dapat terganggu oleh kejadian yang tidak terduga yang dapat terjadi pada seluruh bagian di perusahaan, dan di berbagai aktivitas perusahaan. Manajemen risiko merupakan konsep yang berhubungan dengan jaminan, dimana perusahaan dapat menggunakan jaminan tersebut untuk memberikan perlindungan dari risiko yang mungkin terjadi. Perusahaan akan senantiasa menghadapi risiko yang beragam dan membutuhkan alat untuk menghadapi risiko tersebut dengan kebijakan dan biaya yang rasional. Dan hal tersebut merupakan proses dari manajemen risiko (Moeller, 2009).

Pelaksanaan manajemen risiko merupakan tanggung jawab dari pihak manajemen, bukan auditor internal ataupun komite audit. Sama halnya dengan pengendalian internal, manajemen risiko dilakukan oleh manajemen perusahaan sendiri dengan menentukan risiko apa yang sekiranya akan mereka hadapi,

kemudian merencanakan cara penanggulangannya. Audit internal hanya bertugas untuk menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan (Bapepam, 2008).

Bapepam telah mengeluarkan peraturan No. X.K.6 yang mengharuskan perusahaan publik untuk membuat laporan tahunan yang memuat tentang kinerja perusahaan, salah satunya adalah pelaksanaan manajemen risiko. Di dalam peraturan tersebut, perusahaan perlu mengungkapkan gambaran umum tentang manajemen risiko, identifikasi risiko serta cara perusahaan untuk menanggulunginya, dan efektivitas dari pelaksanaan manajemen risiko tersebut. Perusahaan diharuskan untuk melaksanakan manajemen risiko dengan menentukan bagaimana sistem manajemen risiko yang akan dilakukan, mengidentifikasi risiko dan menentukan cara penanggulangannya, kemudian menilai efektivitas dari manajemen risiko tersebut.

2.1.4 Manajemen Laba

Perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis adalah laba yang dihasilkan perusahaan, informasi laba seperti yang dinyatakan dalam *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC)* Nomor 2 merupakan unsur utama dalam laporan keuangan. Kualitas laba menjadi bagian terpenting dari laporan keuangan, karena kualitas laba dapat menggambarkan kualitas laporan keuangannya.

2.1.4.1 Definisi Manajemen Laba

Healy and Wahlen (1999) dalam Ratsula (2010) menjelaskan definisi manajemen laba sebagai berikut:

Earning management occurs when manager use judgement in financial reporting and in structuring transactions to alter financial report to either mislead some stakeholders about the underlying economic performance of the company or to influence contractual outcomes that depend on reported accounting numbers.

Scott (2000) dalam Rahmawati dkk. (2006) menyatakan bahwa: “*earnings management is the choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific objective*”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa manajemen laba merupakan salah satu kebijakan akuntansi yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai berbagai tujuan spesifik. Lebih lanjut lagi Scott (2000) dalam Rahmawati dkk. (2006) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua:

1. Melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan *political cost (opportunistic earnings management)*.
2. Dengan memandang manajemen laba dari perspektif *efficient contracting (efficient earnings management)*, dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian manajer dapat mempengaruhi nilai pasar perusahaannya melalui manajemen laba, misalnya membuat perataan laba (*income smoothing*) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa manajemen laba adalah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Manajemen laba adalah salah satu faktor yang dapat

menurunkan kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa.

Manajemen laba diduga muncul atau dilakukan oleh manajer atau para pembuat laporan keuangan dalam proses pelaporan keuangan suatu organisasi karena mereka mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang dilakukannya (Gumanti, 2000). Tindakan manajemen laba tersebut dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan apabila digunakan untuk mengambil keputusan, karena manajemen laba merupakan suatu bentuk manipulasi atas laporan keuangan yang menjadi sasaran komunikasi antara manajer dan pihak eksternal perusahaan.

2.1.4.2 Bentuk-bentuk Manajemen Laba

Bentuk-bentuk manajemen laba seperti yang dikemukakan oleh Scott (2000) dalam Rahmawati dkk. (2006).

1. Taking a Bath

Digunakan pada saat resesi, pergantian manajer, *merger* dan restrukturisasi. Biasanya, perusahaan yang merugi akan melaporkan rugi dengan jumlah yang lebih tinggi dari yang sebenarnya dengan cara meningkatkan jumlah beban dan mentransfer laba pada periode berikutnya. Manajer juga melakukan manajemen laba bila laba dibawah target kontrak bonus dan mentransfer laba pada periode berikutnya untuk memperbesar kemungkinan diperoleh bonus pada periode berikutnya.

2. *Income Minimization*

Manajemen laba ini digunakan pada saat perusahaan memperoleh laba yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi perhatian secara politis terhadap perusahaan dan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. *Income minimization* juga dilakukan pada saat perusahaan mengalami persaingan dengan perusahaan asing.

3. *Income Maximization*

Manajemen laba bentuk ini dilakukan agar manajer mendapat bonus yang lebih besar. Demikian pula bila perusahaan mendekati batas pelanggaran kontrak hutang, manajer akan berusaha untuk meningkatkan labanya agar memenuhi persyaratan kontrak

4. *Income Smoothing*

Bentuk ini adalah manajemen laba yang paling populer. Melalui perataan laba, manajer akan menaikkan atau menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan. Ketika laba yang dihasilkan lebih tinggi daripada ramalan manajemen, maka manajer akan melaporkannya lebih rendah dan sebaliknya. Dengan perataan laba, kinerja perusahaan akan terlihat lebih stabil sehingga penanaman modal oleh investor dianggap tidak berisiko. Perataan laba juga dilakukan untuk mengurangi kemungkinan dilanggarnya kontrak hutang yaitu dengan mengatur laba diantara batas bawah dan batas atas target.

2.1.4.3 Faktor-faktor Pendorong Manajemen Laba

Scott (2000) dalam Rahmawati (2006) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba, yaitu:

1. *Bonus Purpose*

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara oportunistik untuk memaksimalkan laba saat ini.

2. *Political Motivation*

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

3. *Taxation Motivation*

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan untuk penghematan pajak pendapatan.

4. Pergantian CEO

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka, dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

5. *Initial Public Offering (IPO)*

Perusahaan yang akan *go public* belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan *go public* melakukan manajemen laba dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

6. Pentingnya Memberi Informasi kepada Investor

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.

Sedangkan Healy dan Wahlen (1999) dalam Firdaus (2007) membagi motivasi manajemen laba kedalam tiga kelompok, yaitu:

1. Motivasi Pasar Modal

Motivasi ini disebabkan oleh adanya anggapan umum bahwa angka-angka akuntansi, khususnya laba merupakan salah satu sumber informasi penting yang digunakan oleh investor dalam menilai harga saham. Sehingga tidak mengherankan kalau ada sebagian manajer yang berusaha membuat laporan keuangannya tampak baik dengan maksud mempengaruhi kinerja saham dalam jangka pendek. Manajemen cenderung melaporkan laba bersih lebih rendah (*understate*) ketika melakukan *buy out* dan melaporkan laba lebih tinggi (*overstate*) ketika melakukan penawaran saham ke publik.

2. Motivasi kontrak

Motivasi ini dikaitkan dengan penggunaan data akuntansi dalam memonitor dan meregulasi kontrak atas perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Secara eksplisit maupun implisit, kontrak-kontrak yang berjenis kompensasi manajemen banyak dikaitkan dengan kinerja keuangan perusahaan. Ada alasan khusus yang menyebabkan mengapa manajemen laba terjadi dalam konteks kontrak yaitu baik kreditor maupun komite kompensasi yaitu komite yang menyiapkan berkas kontrak antara manajer perusahaan, merasa bahwa upaya mengungkapkan ada tidaknya manajemen laba adalah upaya yang

mahal dan membutuhkan waktu. Kondisi ini seakan menjadi pendorong bagi manajer untuk melakukan manajemen laba.

3. Motivasi peraturan

Bagi para penetap standar (*standard setter*), perhatian terhadap manajemen laba menjadi penting karena manajemen laba apapun alasannya dapat mengarah kepada penyajian pelaporan keuangan yang tidak benar (*misleading*) dan akhirnya dapat mempengaruhi alokasi sumber daya yang ada. Manajer dapat memanipulasi laba dengan berbagai cara, baik yang secara langsung berpengaruh terhadap keputusan operasi, pembiayaan, investasi maupun dalam bentuk pemilihan prosedur akuntansi yang diperbolehkan dalam prinsip akuntansi berterima umum.

2.1.4.4 Teknik Manajemen Laba

Teknik dan pola manajemen laba menurut Asyik (2000) dapat dilakukan dengan tiga teknik, yaitu:

1. Perubahan metode akuntansi

Manajemen mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan metode sebelumnya sehingga dapat menaikkan atau menurunkan angka laba. Metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, misalnya:

- a) Mengubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode jumlah angka tahun (*sum of the year digit*) ke metode depresiasi garis lurus (*straight line*).
- b) Mengubah periode depresiasi.

2. Memainkan kebijakan perkiraan akuntansi

Manajemen mempengaruhi laporan keuangan dengan cara memainkan kebijakan perkiraan akuntansi. Hal tersebut memberikan peluang bagi manajemen untuk melibatkan subyektivitas dalam menyusun estimasi, misalnya:

- a) Kebijakan mengenai perkiraan jumlah piutang tak tertagih.
 - b) Kebijakan mengenai perkiraan biaya garansi.
 - c) Kebijakan mengenai perkiraan terhadap proses pengadilan yang belum terputuskan.
3. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Manajemen menggeser periode biaya atau pendapatan (sering disebut manipulasi keputusan operasional), misalnya:

- a) Mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya.
- b) Mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya.
- c) Kerjasama dengan vendor untuk mempercepat atau menunda pengiriman tagihan sampai periode akuntansi berikutnya.
- d) Menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba.
- e) Mengatur saat penjual aktiva tetap yang sudah tidak terpakai.

2.1.4.5 Model-model Pendeteksian Manajemen Laba

Terdapat beberapa metode pendeteksian manajemen laba. Jones (1991) memberikan sebuah model untuk membantu mengidentifikasi perusahaan yang melakukan manajemen laba. Tujuan model Jones adalah untuk memisahkan akrual kelolaan dan non kelolaan. Model modifikasi Jones mengestimasi tingkat akrual yang diharapkan (akrual non kelolaan) sebagai fungsi perbedaan antara perubahan

pendapatan dan perubahan dalam piutang dagang serta aktiva tetap (Thomas dan Zhang, 2000:347).

Perhitungan total akrual dengan pendekatan arus kas dan laporan rugi laba dihitung dengan rumus sebagai berikut (Sloan.1996) :

$$Tat = Earnt - CFOt$$

Dimana:

$$Tat = total\ akrual$$

$$Earn = earnings$$

$$CFO = Arus\ kas\ operasi$$

Seluruh persamaan di atas dibagi dengan menggunakan total aktiva awal tahun pada perusahaan yang diobservasi.

Menurut Sulistyanto (2008: 211) model-model pemisahan akrual menjadi kelolaan dan non kelolaan yang dibandingkan oleh Dechow, dkk adalah sebagai berikut :

1. *The Healy Model*

Model Healy menguji manajemen laba dengan membandingkan rata-rata total akrual (yang diskala dengan *lag* total aset) antara variabel yang berhubungan dengan manajemen laba. Kelemahan model ini adalah total akrual yang digunakan oleh model ini sebagai proksi manajemen laba juga mengandung *nondiscretionary accruals*. Padahal *nondiscretionary accruals* merupakan komponen total akrual yang tidak bisa dikelola dan diatur manajer seperti komponen *discretionary accruals*

2. *The De Angelo Model*

Model DeAngelo dikembangkan dengan menggunakan perubahan dalam total akrual (*change in total accruals*) sebagai proksi manajemen laba, dengan asumsi bahwa perubahan tersebut mempunyai nilai ekspektasi nol yaitu tidak adanya manajemen laba.

Model DeAngelo juga menggunakan total akrual dari periode estimasi untuk memproksikan *nondiscretionary accrual*. Ketika *nondiscretionary accrual* selalu konstan setiap saat dan *discretionary accrual* memiliki rata-rata sama dengan nol dalam periode estimasi, maka Model Healy dan Deangelo akan mengukur *nondiscretionary accrual* tanpa *error*. Jika *nondiscretionary accrual* berubah-ubah dari periode ke periode, maka kedua model akan cenderung menghitung *discretionary accrual* dengan *error*.

3. *The Jones Model*

Menurut Sulistiawan (2011:7), model Jones mengasumsikan bahwa *nondiscretionary accrual* bersifat tetap dari satu periode ke periode lainnya, sehingga perubahan akrual (perbedaan antara akrual tahun ini dengan tahun lalu) yang terjadi disebabkan adanya perubahan *discretionary accrual*. Perubahan akrual dapat disebabkan adanya pertimbangan (diskresi) dari pihak manajemen. Perubahan akrual tidak hanya terjadi karena adanya pertimbangan pengelola perusahaan, tetapi juga dapat terjadi karena adanya perubahan kondisi ekonomi, seperti terjadi perubahan penjualan dan perubahan *property, plant, dan equipment* (PPE) atau aset tetap. Hal ini menunjukkan bahwa model estimasi manipulasi laba harus mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi perusahaan yang dapat

memengaruhi akrual. Oleh karena itu, model ini menambahkan perubahan pendapatan dan PPE ke dalam model estimasi manajemen laba.

4. *The Modified Jones model*

Model ini dikembangkan oleh Dechow *et al.* (1995) untuk mengatasi kelemahan dalam Jones Model, yaitu secara implisit berasumsi bahwa diskresi manajemen tidak dilakukan terhadap pendapatan. Padahal pendapatan tidak sepenuhnya terlepas dari usaha manipulasi. Jika manajer melakukan manipulasi melalui pendapatan, Model Jones menjadi bias (Sulistyan, 2011:72).

Dechow *et al.* (1995) mengasumsikan bahwa perubahan yang terjadi dalam penjualan kredit juga merupakan objek manipulasi laba sehingga Dechow *et al.* (1995) memperbaiki Model Jones dengan menghilangkan variabel piutang dari variabel perubahan penjualan, sehingga menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima benar-benar pendapatan bersih. Perbedaan Model Modified Jones dengan Model Jones hanya terletak pada penentuan *nondiscretionary accrual* saja, dimana untuk mengukur *nondiscretionary accrual* memasukkan unsur perubahan piutang untuk mengestimasi *Non Discretionary Accrual* (Sulistyan, 2011:73).

Model ini banyak digunakan dalam penelitian-penelitian akuntansi karena dinilai merupakan model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba dan memberikan hasil paling *robust* (Sulistyan, 2008:225).

2.2 Penelitian Sebelumnya

Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan dengan Penulis
Prawitt. Smith & Wood	2009	<i>Internal Audit Quality and Earnings Management</i>	Variabel Bebas: -Kualitas internal audit Variabel Terikat: -Manajemen Laba	Terdapat hubungan negatif antara kualitas internal audit dengan manajemen laba	Persamaan: -Variabel manajemen laba Perbedaan: -Variabel likuiditas, profitabilitas solvabilitas (leverage) -Variabel bebas
Al-Muhtadi & El-Helou	2012	<i>The Relationship Between Internal Audit Quality and Earning Management in Joint Stock Companies In Gaza Strip</i>	Variabel Bebas: -Educational qualification -Practical certification -Training -Experience -The size of internal control departement -The size of internal audit work related to prepare and present the financial statement -The knowledge about company operations The independency of the internal audit -Not to participate in the excecutive operation -Internal control guidance -Availability of a system to control the quality of internal audit function performance Variabel Terikat: -Earnings Management	Terdapat hubungan negatif antara kualitas internal audit dengan manajemen laba	Persamaan: -Variabel manajemen laba Perbedaan: -Variabel likuiditas, profitabilitas solvabilitas (leverage) -Variabel bebas

Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan dengan Penulis
Garcia, Barbadillo & Perez	2007	<i>Audit Committee and Internal Audit and The Quality of Earnings: Empirical Evidence from Spanish Company</i>	Variabel Bebas: -Independency -Jumlah anggota komite audit -Jumlah rapat komite audit -Unit internal audit -Rapat antara komite audit dengan unit internal audit -Interaksi antara komite audit dengan unit internal audit Variabel Terikat: -Earnings Manajemen Variabel Kontrol: -Total asset -Leverage -Loss	Terdapat hubungan negatif antara kualitas internal audit dengan manajemen laba	Persamaan: -Variabel manajemen laba -Variabel likuiditas, profitabilitas solvabilitas (leverage) Perbedaan: -Jumlah anggota komite audit -Jumlah rapat komite audit -Rapat antara komite audit dengan unit internal audit -Interaksi antara komite audit dengan unit internal audit
Sunarto	2009	Teori Keagenan dan Manajemen Laba	Variabel Bebas: - Teori Keagenan Variabel Terikat: - Manajemen Laba	Laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen mengandung kebijakan yang mengarah pada manajemen laba	Persamaan: - Teori keagenan Variabel manajemen laba Perbedaan: - Variabel kualitas internal audit - Hasil penelitian

Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan dengan Penulis
Theresia Christina Tarigan	2011	Pengaruh Asimetri Informasi, <i>Corporate Governance</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Manajemen Laba	Variabel Bebas: - Asimetri informasi - <i>Corporate governance</i> - Ukuran perusahaan Variabel Terikat: - Manajemen Laba	- Terdapat Hubungan positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba - Terdapat hubungan positif antara corporate governance dengan manajemen laba - Terdapat hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan manajemen laba	Persamaan: - Ukuran perusahaan - Variabel manajemen laba Perbedaan: - Variabel asimetri informasi

Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan dengan Penulis
Olivya Pramono	2013	Analisis Pengaruh <i>ROA</i> , <i>NPM</i> , <i>DER</i> , dan <i>Size</i> terhadap Praktik Perataan Laba	Variabel Bebas: - <i>ROA</i> - <i>NPM</i> - <i>DER</i> - <i>Size</i> Variabel Terikat: - Manajemen Laba	- Tidak terdapat pengaruh antara <i>ROA</i> dengan manajemen laba - Tidak terdapat pengaruh antara <i>NPM</i> dengan manajemen laba - Tidak terdapat pengaruh antara <i>DER</i> dengan manajemen laba - Tidak terdapat pengaruh antara <i>Size</i> dengan manajemen laba	Persamaan: - Variabel <i>ROA</i> - Variabel <i>DER</i> - Variabel manajemen laba Perbedaan: - Variabel <i>NPM</i>

2.3 Hipotesis

Penelitian yang dilakukan oleh Al-Muhtadi, Randa, *et al* (2012) pada perusahaan *joint stock* yang terdapat di perbatasan Gaza pada tahun 2012 menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan negatif antara kualitas internal audit dan manajemen laba. Prawitt, Douglas F, *et al* (2009) yang juga melakukan penelitian yang sama menggunakan sampel 528 perusahaan yang berasal dari *IIA GAIN database* dan *Compustat database* pada tahun 2000-2005 menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan negatif antara kualitas internal audit dan manajemen laba.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. H₀ : kualitas internal audit tidak memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba.
2. H_a : kualitas internal audit memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.4 Kerangka Konseptual

Teori Agensi telah memberikan penjelasan tentang hubungan antara agen (manajemen) dan pemilik (pemegang saham). Manajemen perusahaan sebagai agen mempunyai lebih banyak informasi dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh pemegang saham sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan terjadinya asimetri informasi dan kecenderungan manajemen untuk melakukan manajemen laba, yaitu perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan keinginannya. Sehingga pemegang saham perlu melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa manajemen telah bertindak sesuai atau selaras dengan kepentingan pemegang saham. Internal audit disini merupakan suatu alat yang dapat digunakan

oleh para pemegang saham untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja manajemen.

Manajemen perusahaan perlu memberikan laba yang berkualitas dan tidak menyesatkan pemegang saham. Dengan menerapkan internal audit yang berkualitas, diharapkan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen dapat diperkecil kemungkinannya untuk memberikan keyakinan bagi pemegang saham bahwa manajemen telah bekerja, bertindak, dan membuat keputusan secara efektif dan selaras dengan kepentingan pemegang saham. Untuk itu, penelitian ini akan membahas tentang pengaruh kualitas internal audit terhadap manajemen laba. Selain itu, juga akan dibahas mengenai pengaruh variabel kontrol, yaitu *size*, *leverage*, dan *profit*. Kerangka konseptual dalam bentuk gambar dapat dilihat pada Gambar 2.1.

